

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Pergub 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis sehingga berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Renja tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan sumber dana yang membutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun yang akan datang.

Mataram, Juni 2017


KEPALA DINAS
Drs. TRI BUDI PRAYITNO, M.Si
NIP. 19681016 198803 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	17
2.3	Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	22
3.3	Program dan Kegiatan	24
	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD, menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
2. Renstra OPD, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dalam rancangan renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu OPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Kepala Daerah dalam dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian serta urusan Statistik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah : **Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.**

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2017-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana dan pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembar Negara nomor 5494);
- 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembar Negara 5495);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 27 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
3. Review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Agar program dan kegiatan yang ada didalam Renja dapat terakomodir seluruhnya didalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018.
2. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Pada evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Analisis kinerja pelayanan OPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan, memuat telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, dan program dan kegiatan. Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait tugas pokok dan fungsi OPD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Sedangkan program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya;
4. Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Berdasarkan Perda No. 11 tahun 2016 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Penggabungan dari tiga urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang Kominfo, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik. Dimana masing masing urusan pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari 6 program prioritas dan 22 kegiatan, antara lain urusan pemerintah bidang Kominfo yang merupakan gabungan dari Dinas Hubkominfo, Biro Umum, dan KPID sebesar Rp. 4.826.599.750,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, untuk urusan pemerintah bidang Persandian yang dulu berada di Biro Umum sebesar Rp. 149.078.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, dan urusan pemerintah bidang Statistik yang dulu berada di BAPPEDA sebesar Rp. 1.736.489.600,- dengan realisasi fisik sebesar 100% Adapun rincian masing masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.934.795.700,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.32% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 157.500.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.56%.
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 483.290.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.45%.
 - c. Penguatan Komunitas Kampung Media, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 519.900.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.93%.
 - d. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 440.197.700,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.93%.
 - e. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 96.500.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.93%.

- f. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundangundangan Penyiaran dan KMIP, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 58.380.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.93%.
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 120.875.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85.93%.
 - h. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 589.770.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.45%.
 - i. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 76.832.500,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.45%
 - j. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Komunikasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 242.472.500,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.45%.
 - k. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 149.078.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.45%.
2. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 276.686.650,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.94% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pembinaan dan Penertiban Jasa Titipan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92.30%.
 - b. Pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara/Pengguna Jasa Komunikasi seNTB, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 59.782.800,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.78%.
 - c. Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Postel seNTB, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 21.022.800,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99%.

- d. Pengawasan Layanan Tata Kelola Kewajiban Pelayanan Umum, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 86.727.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99%
 - e. Penyuluhan Penggemar Prangko dan Filatelli seNTB, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 54.154.050,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99%
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 124.455.000,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91.31%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 124.455.000,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.31%.
4. Program Fasilitasi Komisi Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 384.472.400,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100% . Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 384.472.400,- realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99.52%.
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.255.268.000,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Penyusunan System Informasi Terhadap Pelayanan Publik, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 304.398.000,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%.
 - b. Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 950.870.000,capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%.
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.736.489.600,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99.95%. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.021.125.000,- capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99%.

- b. Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 715.364.600, capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92.57%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Telepon, Internet dan Listrik	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang Dibayar	Orang	8	8	100	8	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Orang	8	8	100	8	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo dan Statistik	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	Tahun	1	1	100	1	
	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tahun	1	1	100	1	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Terselenggaranya Pembayaran PTT/Tenaga Lepas	Tahun	1	1	100	1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tahun	1	1	100	1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	2	2	100	4	
	Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik	Terselenggaranya Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik	Unit	1	1	100	24	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tahun	1	1	100	1	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	13	13	100	30	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit			100	95	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	2	2	100	-	
	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Tahun	1	1	100	1	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100	1	
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Dokumen	5	5	100	5	
	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD	Dokumen	-	-	100	1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	100	1	
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa							
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Penyebaran Informasi bagi Masyarakat dengan Memanfaatkan IT dan Media lainnya	Tahun	1	1	100	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersebaranya Informasi Melalui Media Tradisional	Dokumen	3	3	100	-	
	Penguatan Komunitas Kampung Media	Terselenggaranya Pembinaan dan Jambore Komunitas Kampung Media	Orang				50	
	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik	Tahun	1	1	100	1	
	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terselenggaranya Kegiatan Sambung Rasa dengan Anggota KIM	Orang			100	240	
	Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan penyiaran dan Keterbukaan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)	Terlaksananya Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP	Dokumen	3	3	100	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dokumen	1	1	100	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Dokumen	2	2	100	-	
	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Dokumen	3	3	100	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Aplikasi yang di Bangun	Aplikasi	2	2	100	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Tanggapan Pengaduan melalui SMS Center	SMS Keluar	12000	12000	100	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana TIK	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang Tersedia	Unit	-	-	-	19	
	Penguatan Tata Kelola TIK	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-Government	Dokumen	-	-	-	1	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan TIK	Tahun	-	-	-	1	
7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi							
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Pelatihan Operator SIP PPID	Orang			100	400	
	Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Bimbingan Teknis SDM Komunikasi Publik	Orang				40	
	Pelatihan SDM Jabatan Fungsional Bidang Kominfo	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas	Orang	-	-	-	4	
8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media							
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Tahun	-	-	-	1	
9	Program Fasilitasi Komisi Informasi							
	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi (KI)	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Tahun	1	1	100	1	
10	Program Optimalisasi Pelayanan EProcurement							
	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tahun	1	1	100	1	
	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Terselenggaranya Penguatan Standarisasi LPSE	Tahun				1	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
11	Program Fasilitas KPID							
	Penguatan Kelembagaan KPID	Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Tahun	-	-	-	1	
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya Data dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	Orang	20000	20000	100	-	
	Implementasi Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan E-Procurement	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Paket	500	500	100	-	
13	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi							
	Pembinaan dan Penertiban Jasa Titipan	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Jasa Titipan	Tahun	1	1	100	-	
	Pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara/Pengguna Jasa Komunikasi se-NTB	Terlaksananya Pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi	Tahun	1	1	100	-	
	Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Postel	Terpantaunya Penggunaan Alat dan Perangkat Pos serta Informatika yang beredar di Pasaran Lokal	Tahun	1	1	100	-	
	Pengawasan Layanan Tata Kelola Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)	Terawasi Penyelenggaraan Layanan Tata Kelola Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)	Tahun	1	1	100	-	
	Penyuluhan Penggemar Perangko dan Filatelli se-NTB	Terlaksananya Sosialisasi dan Pameran Perangko dan Filatelli	Tahun	1	1	100	-	
14	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah							
	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Tersusunnya Kajian tentang Masalah Pembangunan di NTB	Dokumen	11	11	100	-	
	Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah	Terkelolanya Pusat Data Daerah (Bale ITE Provinsi NTB)	Dokumen	4	4	100	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi 2016			Target 2017	Target Renstra
				Target	Realisasi	%		
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Sosial	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang Sosial	Dokumen	-	-	-	3	
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Ekonomi	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang Ekonomi	Dokumen	-	-	-	3	
	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik SDA dan Infrastruktur	Tersusunnya Data/Statistik Daerah Bidang SDA dan Infrastruktur	Dokumen	-	-	-	3	
15	Program Optimaliasi Keamanan Informasi							
	Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Terselenggaranya Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Tahun	-	-	-	1	
	Operasional dan Tata Kelola Persandian	Terselenggaranya Operasional dan Tata Kelola Persandian	Tahun	-	-	-	1	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai instansi pemerintah yang mengurus 3 (tiga) urusan pemerintahan, yang melakukan tugas utamanya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan memastikan ketersediaan informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari :

1. Jumlah Yang Mengakses Layanan NTB Online yang terdiri dari dua komponen yaitu kunjungan pada website PPID utama dan RKPD Online (e-Planning), proses penyajian informasi pada PPID utama diawasi oleh Dinas Kominfotik sedangkan untuk penyajian informasi pada RKPD Online (ePlanning) pengawasan dilakukan oleh BAPPEDA, dan pada akhir tahun oleh Komisi Informasi akan diberikan reward kepada OPD yang dinilai informatif.
2. Aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se-NTB Yang Terbangun, guna menunjang penyebaran informasi yang lebih efektif dan efisien maka perlu pada Kabupaten/Kota untuk membangun PPID utama dan pada masing masing OPD lingkup pemerintah provinsi untuk membangun website PPID OPD sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat dan mudah, dimana dalam proses penyajian informasi oleh masing masing OPD terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis bagi pengelola web di masing masing OPD.
3. Jumlah Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat, selain informasi pembangunan daerah yang dapat diakses melalui website PPID maupun RKPD Online (e-Planning), Dinas Kominfotik juga mengemban tugas penyebaran informasi bermanfaat lainnya melalui kegiatan literasi media kelompok informasi masyarakat (KIM), informasi potensi daerah dan informasi edukatif lainnya yang dapat dilihat pada website Kampung Media, selain itu ada juga penyebaran informasi melalui media cetak, baliho, spanduk, dan mobil calling.
4. Peringkat e-Government Indonesia (PeGI), dimana pemerintah provinsi NTB menargetkan pada tahun 2017 menjadi peringkat 9 (sembilan) nasional, penilaian dilakukan langsung oleh Kementerian Kominfo meliputi 5 (lima) dimensi penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Pada tahun 2015 pemerintah provinsi NTB menduduki peringkat 12 (dua belas) nasional, sudah dalam 2 tahun terakhir ini Kementerian Kominfo belum mengeluarkan rilis resmi peringkat e-Government Indonesia.

5. Tingkat Kunjungan dan Permintaan Informasi Pembangunan Daerah melalui Desk Layanan, Selain melalui website PPID utama dan PPID dinas pelayanan informasi juga tetap dilakukan melalui desk layanan dimana UPTD Bale ITE menjadi pelaksana terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat selain dilakukan oleh dinas.
6. Data dan Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis TIK, dimana provinsi NTB menyediakan informasi dan pelayanan terkait pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen yang dilakukan secara elektronik, agar lebih transparan dan akuntabel.
7. Data, Informasi yang Disusun, dimana penyusunan data dan informasi statistik sektoral menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Kominfotik, pada tahun 2017 Dinas Kominfotik memiliki target menyusun 9 buku/dokumen 3 (tiga) untuk statistik yang berkaitan dengan ekonomi, 3 (tiga) untuk statistik yang berkaitan dengan sosial, dan 3 (tiga) untuk statistik yang berkaitan dengan SDA dan infrastruktur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berikut isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
4. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal;
5. Pengembangan industri wisata di Nusa Tenggara Barat;
6. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi;
7. Satu data untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat;
8. Proses pengadaan barang dan jasa secara akuntabel;
9. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan antar kabupaten/kota;
10. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi;
11. Inisiatif Nusa Tenggara Barat menuju provinsi cerdas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJM Nasional Periode 3 (2015-2019) yaitu meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja

instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, efektivitas dalam pelaksanaan segala jenis tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai dengan Visi dan Misi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu :

- VISI
 - Terdepan dalam Informasi menuju Provinsi Cerdas.

- MISI
 1. Mengoptimalkan Penerapan e-Government;
 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi kepada Masyarakat;
 3. Menyediakan Data Statistik Sektorial Berkualitas;
 4. Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data dan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah;
 5. Meningkatkan Penggunaan Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pengamanan Informasi Berklasifikasi;
 6. Meningkatkan Kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Bidang Koinfo, Statistik dan Persandian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dari Penjabaran Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1. Mengoptimalkan Penerapan e-Government	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kapasitas aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	1. Melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi e-Government.
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI).	1. Terlaksananya koordinasi antar OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB
Misi 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi	1. Terwujudnya Masyarakat yang Berwawasan Teknologi Informasi
Misi 3. Menyediakan Data Statistik Sektorial Berkualitas	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan ketersediaan data yang valid, akurat, dan terkini dalam penyelenggaraan pembangunan	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan baik data statistik dasar maupun data statistik sektoral
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan kemudahan akses data melalui satu pintu	1. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kemudahan akses data
Misi 4. Meningkatkan Pengelolaan Pusat data dan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	
Tujuan	Sasaran
1. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang lengkap 2. Tersedianya system pengelolaan data dan informasi yang mudah dan cepat diakses
2. Meningkatkan pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan kepada masyarakat	1. Tersedianya tempat yang nyaman untuk mencari dan mengakses data dan informasi 2. Termanfaatkannya seluruh fasilitas pelayanan data dan informasi kepada masyarakat

Misi 5. Meningkatkan Penggunaan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	1. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang LPSE dan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pengamanan informasi yang berklasifikasi milik Pemerintah Provinsi NTB	1. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Persandian dan sarana prasarana yang memadai.
Misi 6. Meningkatkan Kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Bidang Koinfo, Statistik, dan Persandian	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian	1. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian	1. Tersedianya sarana dan prasarana bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun program dan kegiatan dimaksud antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
9. Program Fasilitasi Komisi Informasi (KI);
10. Program Optimalisasi Layanan e-Procurement;
11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
13. Program Optimalisasi Keamanan Informasi.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2018 yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator, target, dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2018

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika				
2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi	12 Keg	2.678.993.900
2.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	1 Tahun	4.680.000
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik	Provinsi	1 Tahun	782.000.000
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai administrasi keuangan yang dibayar	Provinsi	9 Orang	80.602.000
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi	17 Orang	191.847.600
2.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	Provinsi	1 Tahun	95.244.800
2.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Provinsi	1 Tahun	79.823.000
2.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	1 Tahun	14.190.300

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Diskominfo	Provinsi	20 Eksemplar	46.500.000
2.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Provinsi	1 Tahun	100.000.000
2.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi	1 Tahun	200.609.800
2.10.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah PTT yang dibayar	Provinsi	3 Orang	818.146.000
2.10.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi	10 Kab/Kota	265.350.400
2.10.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	Provinsi	6 Kegiatan	927.666.600
2.10.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi	3 Unit	52.899.000
2.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi	17 Unit	124.900.000
2.10.01.02.11	Pengadaan ups/stabilizer/komputer dan alat-alat elektronik lainnya	Jumlah pengadaan ups/stabilizer/komputer dan alat-alat elektronik lainnya	Provinsi	4 Unit	18.372.600
2.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi	1 Tahun	10.000.000
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	25 Unit	310.595.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Provinsi	90 Unit	410.900.000
2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi	Provinsi	2 Kegiatan	183.834.200
2.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Provinsi	5 Orang	100.000.000
2.10.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik Aparatur	Provinsi	1 Tahun	83.834.200
2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan Keuangan	Provinsi	2 Kegiatan	71.663.600
2.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan	Provinsi	2 Dokumen	51.238.000
2.10.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan SKPD	Provinsi	3 Dokumen	20.425.600
2.10.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya aset daerah	Provinsi	1 Kegiatan	57.837.300
2.10.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terbayarnya honor pengurus barang dan penyimpan barang	Provinsi	12 Bulan	57.837.300
2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Provinsi	3 Kegiatan	1.034.750.000
2.10.01.15.11	Penguatan komunitas kampung media	Terselenggaranya pembinaan dan jambore komunitas kampung media	10 kab/kota	12 Bulan	537.900.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.15.12	Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Terselenggaranya pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	Provinsi	1 Tahun	324.800.000
2.10.01.15.13	Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Terselenggaranya kegiatan sambung rasa dengan anggota KIM/Tokoh Budaya dalam rangka informasi pembangunan	10 kab/kota	1 Tahun	172.050.000
2.10.01.16	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terfasilitasinya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi	3 Kegiatan	574.023.200
2.10.01.16.01	Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	Terselenggaranya pelatihan SDM bidang komunikasi dan infomatika	Provinsi	1 Tahun	469.023.200
2.10.01.16.02	Pelatihan SDM Bidang Persandian	Jumlah SDM bidang persandian yang terlatih	Jakarta/ Provinsi lainnya	3 Orang	50.000.000
2.10.01.16.03	Pelatihan teknis analisis sistem dinamis	Jumlah SDM bidang statistik yang terlatih	Jakarta/ Provinsi lainnya	3 Orang	55.000.000
2.10.01.17	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terpenuhinya Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Provinsi	1 Kegiatan	2.039.666.000
2.10.01.17.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Provinsi	1 Tahun	2.039.666.000
2.10.01.20	Program Fasilitasi Komisi Informasi (KI)	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi (KI)	Provinsi	1 Kegiatan	872.400.000
2.10.01.20.01	Penguatan kelembagaan komisi informasi (KI)	Terselesaikannya sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi	Provinsi	6 Kasus	872.400.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.10.01.21	Program Optimalisasi Layanan e-Procurement	Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi	2 Kegiatan	1.226.670.000
2.10.01.21.01	Penguatan layanan sistem pengadaan secara elektronik	Terlaksananya penguatan layanan sistem pengadaan secara elektronik	Provinsi	1 Tahun	290.330.000
2.10.01.21.02	Penguatan standarisasi LPSE Provinsi NTB	Terlaksananya standarisasi LPSE Provinsi NTB	Provinsi	1 Tahun	936.340.000
2.10.01.25	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Yang Mengakses Layanan NTB Online	Provinsi	3 Kegiatan	1.813.380.000
2.10.01.25.14	Pengembangan dan implementasi aplikasi TIK	Terbangunnya portal website Provinsi NTB, portal layanan public pengaduan masyarakat, dan aplikasi dashboard informasi NTB	Provinsi	3 Website/ Aplikasi	285.305.000
2.10.01.25.15	Penguatan tata kelola TIK	Tersusunnya pergub tata kelola e-Government, kebijakan kelembagaan GCIO dan komite e-Government	Provinsi	2 Dokumen	121.975.000
2.10.01.25.21	Pemeliharaan sarana dan prasarana TIK	Tersedianya bandwidth internet dan jaringan intra pemerintah, block IP versi 4 dan IP versi 6, web hosting dan instalasi jaringan komputer	Provinsi	1 Tahun	1.406.100.000
2.14	Urusan Statistik				
2.14.01.18	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersusunnya Data/Informasi/Statistik Daerah	Provinsi	5 Kegiatan	1.648.933.720
2.14.01.18.02	Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah	Terlayaninya komunikasi dan edukasi informasi teknologi bagi masyarakat	Provinsi	24 Kegiatan	675.046.420

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
2.14.01.18.03	Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Tersusunnya kajian tentang masalah pembangunan di NTB Terkelolanya data dan informasi pembangunan Provinsi NTB dalam kerangka NTB 1 Data	Provinsi	2 Dokumen 1 Tahun	351.100.000
2.14.01.18.06	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik sosial	Terselenggaranya pengembangan data/statistik daerah bidang sosial	Provinsi	1 Dokumen	215.271.300
2.14.01.18.07	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik ekonomi	Terselenggaranya pengembangan data/statistik daerah bidang ekonomi	Provinsi	1 Dokumen	217.883.000
2.14.01.18.08	Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis dan diseminasi statistik sumber daya air dan infrastruktur	Terselenggaranya pengembangan data/statistik daerah bidang sumber daya alam dan infrastruktur	Provinsi	2 Dokumen	189.633.000
2.15	Urusan Persandian				
2.15.01.22	Program Optimalisasi Keamanan Informasi	Terselenggaranya pengamanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Provinsi	2 Kegiatan	514.190.000
2.15.01.22.05	Pengendalian informasi dan telekomunikasi	Terselenggaranya pengendalian informasi dan telekomunikasi	8 kab dan 2 kota	1 Tahun	335.350.000
2.15.01.22.07	Operasional dan tata kelola persandian	Terselenggaranya operasional dan tata kelola persandian	8 kab dan 2 kota	1 Tahun	178.840.000

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahun pertama berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.